**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Deskripsi Mutu Pendidikan**
2. **Pengertian Mutu Pendidikan**

Sebelum membahas tentang mutu pendidikan, maka terlebih dahulu akan didefinisikan tentang pengertian mutu. Secara umum, mutu dapat diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.[[1]](#footnote-2)

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses pendidikan. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia (kepala madrasah, guru, karyawan, siswa) dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dan sebagainya). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana dan program. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh madrasah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat madrasah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduaan input madrasah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan dan sebagainya) dilakukan secara harmonis, sehingga menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar cara belajar (mampu mengembangkan dirinya).

Output pendidikan adalah merupakan kinerja madrasah. Kinerja sekolah adalah prestasi madrasah yang dihasilkan dari proses/perilaku madrasah. Kinerja madrasah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya dan moral kerjanya.

Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah dapat dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan berkualitas atau bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi siswa, menunjukan pencapaian yang tinggi dalam:

1. Prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum, nilai ujian akhir, karya ilmiah, lomba-lomba akademik.
2. Prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olaharaga, kesenian, keterampilan, kejuruan, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.[[2]](#footnote-3)

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, keluaran dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari berbagai sisi. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku kurikulum, prasarana dan sarana sekolah. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa alat lunak, seperti peraturan struktur organisasi, deskripsi kerja, dan struktur organisasi. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan seperti visi, motivasi, ketekunan dan cita-cita.[[3]](#footnote-4) Tenaga pendidik (guru) berdasarkan Undang-Undang Guru dan Guru pasal 10 (1) bahwa tenaga pendidik mempunyai empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi kepribadian dan kompetensi social yang diperoleh melalui pendidikan profesi.[[4]](#footnote-5)

Beberapa konsep mutu yang diutarakan oleh Abdul Hadis, dan Nurhayati, dalam Manajemen Mutu Pendidikan menurut para ahli yaitu:

1. Menurut Juran, mutu produk ialah kecocokan penggunaan produk (*fitness for use*) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan pengguna produk tersebut didasarkan atas lima ciri utama yaitu (1) teknologi; yaitu kekuatan; (2) psikologis, yaitu rasa atau status; (3) waktu, yaitu kehandalan; (4) kontraktual, yaitu ada jaminan; (5) etika, yaitu sopan santun.
2. Menurut Crosby mutu ialah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan.Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan, standar mutu meliputi bahan baku,proses produksi, dan produk jadi .
3. Menurut Deming mutu ialah kesesuaian kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai pangsa pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen merasa puas, maka mereka akan setia dalam membeli produk perusahaan baik berupa barang maupun jasa.
4. Menurut Feigenbaum mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfication*). Suatu produk dianggap bermutu apabila memberikan kepuasan kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan.
5. Garvi dan Davis menyatakan mutu ialah suatu kondisi yang berhubungan dengan produk, tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.[[5]](#footnote-6)

Beberapa konsep mutu yang diutarakan oleh para ahli, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa mutu merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan terhadap sebuah produk. Menurut Sallis dalam Thomas mengatakan bahwa mutu dapat diartikan sebagai derajat kepuasan luar biasa yang di terima oleh pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.[[6]](#footnote-7) Menurut Marus Suti, mutu dapat dilihat dari dua sisi yaitu segi normatif dan segi diskriptif. Dalam arti normatif mutu berdasarkan pertimbangan instrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai standar ideal. Sedangkan secara ekstrinsik, pendidikan merupakan instrument untuk mndidik tenaga kerja yang terlatih. Dalam arti deskriptif,mutu ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya misalnya hasil tes.[[7]](#footnote-8)

Dengan demikian, penulis simpulkan bahwa mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstra kulikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu. Mutu dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai sekolah pada kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil tes kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, UN atau UAMBN). Dapat pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*) seperti suasana disiplin, keakraban,saling menghormati, kebersihan, dan ssbagainya.

Achmad mengemukakan bahwa, mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efesien terhadap komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap norma atau standar yang berlaku.[[8]](#footnote-9) Apapun yang dilakukan harus berpatokan pada aturan dan standar. Ada banyak pendapat mengenai kriteria mutu pendidikan. Mutu pendidikan menurut standar nasional pendidikan adalah pendidikan yang menghasilkan lulusan sesuai dengan harapan masyarakat, baik dalam kualitas pribadi, moral pengetahuan maupun kompetensi kerja.

Mutu merupakan sebuah konsep yang kontradiktif sebab di satu sisi mutu dapat diartikan sebagai konsep yang absolut dan di sisi lain bisa diartikan konsep yang relatif. Sebagai konsep yang absolut,mutu dipahami sebagai dasar penilaian untuk kebaikan dan kebenaran yang memungkinkan standar tinggi dan tidak dapat diungguli. Sedangkan mutu yang bersifat relatif ialah mutu dapat dinilai terus kelanjutannya, mutu merupakan produk konseptual yaitu apa yang dianggap sekarang bermutu belum tentu besok bisa dianggap bermutu sehingga perlu adanya perbaikan terus menerus. Secara terminology mutu telah didefinisikan secara beragam, Edward Dening mendefinisikan mutu sebagai “ kesesuaian dengan kebutuhan pasar”, dari definisi ini, Armand V. Feigenbaun mengatakan ukuran relatif dari suatu produk atas jasa sesuai dengan standar mutu desain. Mutu desain meliputi spesifikasi produk dan mutu kesesuaian, yaitu seberapa jauh suatu produk telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan berbagai pengertian mutu tersebut maka manajemen mutu berarti sebagai keseluruhan metode untuk mengatur mutu dalam suatu organisasi yang meliputi produk, jasa, kinerja, proses dan sumber daya manusia. Manajemen mutu menggabungkan trilogi mutu,yaitu perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan perbaikan mutu.[[9]](#footnote-10)

Dengan demikian dapat simpulkan bahwa mutu pendidikan bukan ditentukan dari lembaga pnyelenggara pendidikan tetapi mutu pendidikan adalah spesifikasi yang dikehendaki dan kesesuaian dengan apa yang menjadi pandangan serta harapan masyarakat, dengan mengoptimalkan keseluruhan penunjang mutu pendidikan, yaitu input, proses, sehingga akan menghasilkan kualitas output mutu pendidikan yang tinggi.Indikator sekolah bermutu dari perspektif *service provider* adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan harus memenuhi indikator produk sebagai berikut:

1. Sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau *confoormance to specification.*
2. Sesuai dengan penggunaan atau *finess for purpose or use.*
3. Produk tanpa cacat atau *zero defect.*
4. Sekali benar dan seterusnya atau *right first every time .*

Mutu adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri.[[10]](#footnote-11) Mutu terkait dengan produk dan jasa yang ditawarkan pada pelanggan. Total Quality Manajemen adalah perencanaan metode kuantitatif dan pengetahuan kemanusiaan untuk:

1. Memeperbaiki material dan jasa yang menjadi masukan organisasi.
2. Memperbaiki semua proses penting dalam organisasi.
3. Memperbaiki upaya memenuhi kebutuhan para pemakai produk dan jasa pada masa kini dan diwaktu yang akan datang.[[11]](#footnote-12)

Garvin yang dikutip Hadis mengemukakan bahwa sebagai suatu konsep sudah lama dikenal tetapi kemunculannya sebagai fungsi manajemen baru terjadi akhir-akhir ini. Garvin membagi pendekatan modern terhadap mutu kedalam empat era mutu, yaitu inspeksi, pengendalian mutu secara statistik, jaminan mutu dan manajemen mutu strategik.[[12]](#footnote-13)

Pada konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, keluaran dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari berbagai sisi. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku kurikulum, prasarana dan sarana sekolah. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa alat lunak,seperti peraturan struktur organisasi, deskripsi kerja, dan struktur organisasi. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan seperti visi, motivasi, ketekunan dan cita-cita.[[13]](#footnote-14)

Mutu mengacu pada proses dan hasil pendidikan. Pada proses pendidikan, mutu pendidikan berkaitan dengan bahan ajar, metodologi, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, lingkungan dan sebagainya. Namun pada hasil pendidikan, mutu berkaitan dengan prestasi yang dicapai sekolah dalam kurun waktu tetentu yang dapat berupa tes kemampuan akademik, seperti ulangan umum, raport, ujian nasional, dan prestasi non-akademik seperti dibidang olah raga, seni atau keterampilan.[[14]](#footnote-15) Mutu dalam pendidikan dapat dilihat dari segi relevansinya dengan kebutuhan masyarakat, dapat tidaknya lulusan dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya bahkan sampai memperoleh suatu pekerjaan yang baik, serta kemampuan seseorang didalam mengatasi persoalan hidup. Mutu pendidikan dapat ditinjau dari kemanfaatan pendidikan bagi individu, masyarakat dan bangsa atau Negara. Secara spesifik ada yang melihat mutu pendidikan dari segi tinggi dan luasnya ilmu pengetahuan yang ingin dicapai oleh seseorang yang menempuh pendidikan.

Mutu pendidikan merupakan salah satu isu sentral dalam pendidikan nasional, terutama berkaitan dengan rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Menyadari hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasioanal, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompentensi guru, pengadaan buku dan media pembelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah.

1. **Standar Mutu Pendidikan**

Mutu pendidikan adalah upaya untuk menghasilkan manusia yang sehat dan cerdas dengan kepribadian yang kuat, religius dan menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, kesadaran demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kesadaran moral-hukum yang tinggi dan kehidupan yang makmur dan sejahtera[[15]](#footnote-16). Apabila dikonversikan pada pendidikan, maka mutu harus diukur dari kreteria masyarakat bukan kriteria perencanaan dan peyelenggaraan pendidikan. Sehingga dibedakan dua jenis mutu dalam pendidikan yaitu mutu fungsional. Yang berupa ukuran yang mengenai apa yang diukur oleh sistem, dan mutu teknikal yakni apa ukuran mengenai bagaimana sistem mengukurnya[[16]](#footnote-17).

Standar mutu pendidikan di Indonesia ditetapkaan dalam suatu standarisasi Nasional dan dikenal dengan standar Nasional Pendidikan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian bahwa standar nasional pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia. Standar nasional pendidikan tersebut meliputi:

1. Standar kompentensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompentensi yang dituangkan dalam kriteria tentang tamatan, kompentensi bahan kajian, kompentensi mata pelajaran, silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompentensi lulusan.
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yan berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
8. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen hasil belajar peserta didik.[[17]](#footnote-18)

Dalam konteks pendidikan nasional maka ke empat indikator mutu tersebut di atur dalam SNP sesuai dengan UU No 32 Tahun 2013 yaitu: standar isi, standar kompetensi lulusan, standaar proses, standar pembiayaan, standar pengelolaan, standar sarana prasarana, standar penilaian pendidikan. Sedangkan indikator mutu pendidikan menurut spesifikasi *costemer* ialah kepuasan pelanggan bila produk dan jasa memenuhi harapan pelanggan dan setia kepada pelanggan bila produk dan jasa memenuhi harapan. Pelanggan sesuai dengan konsep bahwa pendidikan adalah layanan jasa maka indikator kepuasan pengguna dapat dilihat dari penampilan, respons, handal, keyakinan, empati. Indikator peningkatan mutu pendidikan disekolah dilihat pada setiap komponen pendidikan antara lain: mutu lulusan, kualitas guru, kepala sekolah, staf sekolah, proses pembelajaran sarana dan prasarana, pengelolaan sekolah, implementasi kurikulum, sistem penilaian, dan komponen lainya. Ini berarti melalui pengawasan harus terlihat dampaknya terhadap kinerja sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengawas sekolah harus menjadi bagian intergral dalam meningkatkan mutu pendidikan agar bersama guru, kepala sekolah, staf sekolah dan lain sebagainya berkolaborasi membina dan mengembangkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan seoptimal mungkin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.[[18]](#footnote-19)

Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dalam pelaksanaan tugasnya juga harus memiliki standarisasi sekolah yang bermutu sehingga mampu bersaing dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.

Engkoswara memaparkan standar sekolah yang bermutu adalah:

1. Administrator dan jajaran serta guru-guru adalah para profesional yang handal.
2. Tersedia kurikulum yang luas bagi seluruh siswa
3. Memiliki filosofi yang selalu dikomunikasikan bahwa seluruh anak dapat belajar dengan harapan yang tinggi.
4. Iklim yang baik untuk belajar, aman, bersih, memperdulikan dan mengorganisasian dengan baik
5. Suatu sistem penilaian berkelanjutan yang didukung supervisi
6. Keterlibatan masyarakat yang tinggi
7. Membantu mengembangkan strategi, teknik intruksional dan mendorong kerja sama kelompok
8. Pengorganisasian SDM untuk melayani seluruh siswa
9. Komunikasi dengan orang tua dan meyediakan waktu cukup untuk dialog
10. Menetapkan dan mengartikulasikan tujuan secara jelas
11. Bekerja untuk memelihara moril tinggi yang berkontribusi terhadap stabilitas organisasi dan membatasi tingkat turn over (perputaran guru)
12. Bekerja keras untuk memelihara ukuran kelas sesuai dengan aturan yang ada.
13. Kembangkan dengan staf dan orang tua kebijakan sekolah dalam disiplin, penilaian, kehadiran, pengujian, promosi dan ingatan
14. Memelihara hubungan baik dengan pemerintah daerah.[[19]](#footnote-20)

Kaitan dengan standarisasi yang harus dicapai, E. Mulyasa[[20]](#footnote-21) dalam bukunya mengatakan bahwa dalam pendidikan terdapat dua jenis standar, yaitu “standar akademis dan standar kompetensi. Standar akademik mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilan esensial setiap disiplin ilmu yang harus dipelajari oleh semua peserta didik yang terdapat dalam kurikulum. Sedangkan standar kopetensi ditunjukan dalam bentuk proses atau hasil kegiatan yang didemonstrasikan oleh peserta didik sebagai penerapan dari pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya. Oleh karena itu, standar akademis bisa saja sama untuk semua peserta didik akan tetapi standar kopetensi bisa beda.[[21]](#footnote-22)

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran dari kualitas pendidikan adalah jika setiap orang memiliki penetahuan yang dapat dimanifestasikan kedalam pola berfikir, dan bisa pula ditunjukan dalam berprilaku. Sebuah pendidikan belum bisa berhasil jika output yang dikeluwarkan belum mampu dikeluwarkan belum mampu menunjukan keterampilan dan sikap yang baik atau pengetahuan yang diperoleh hanya sekedar simbol yang ada pada diri peserta didik.

1. **Indikator Mutu Pendidikan**

Indikator mutu pendidikan sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu adalah tolak ukur yang digunakan untuk menentukan mutu pendidikan. Pembahasan mengenai indikator mutu pendidikan ini, tidak bisa lepas dari pandangan yang mengemukakan bahwa lembaga pendidikan merupakan suatu sistem dari sistem kemasyarakatan. Karena lembaga pendidikan merupakan suatu sistem maka akan diperoleh beberapa komponen sistem yang saling berinteraksi dalam suatu proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Dirto komponen-komponen yang dapat dijadikan tolak ukur mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

1. *Raw input*; murid-murid yang berada dalam sistem pendidikan di sekolah.
2. *Instrumental input*; terdiri dari unsur-unsur; 1) tujuan pendidikan, 2) kurikulum, 3) fasilitas dan media pendidikan, 4) sistem administrasi pendidikan, 5) sistem penyampaian informasi, 6) tenaga pengajar, 7) sistem evaluasi, 8) bimbingan dan penyuluhan.
3. Lingkungan; terdiri dari lingkungan ekologi dan masyarakat yang dapat mempengaruhi proses pendidikan.
4. Hasil langsung pendidikan merupakan tingkah laku anak didik setelah mereka mengalami proses pendidikan.
5. Hasil akhir pendidikan merupakan tingkah laku peserta didik setelah terjun ke dalam kehidupan di masyarakat luas sebagai hasil proses pendidikan.[[22]](#footnote-23)

Mengkaji proses pendidikan merupakan suatu sistem, seperti yang diuraikan tersebut, maka dapat ditelusuri dari elemen-elemen tersebut yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur, untuk menentukan mutu pendidikan. Beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak ukur mutu pendidikan:

1. Hasil akhir pendidikan. Hasil akhir pendidikan merupakan tujuan akhir pendidikan (*ultimate goal*), yang hasilnya baru memberikan gambaran secara umum,
2. Hasil langsung pendidikan. Hasil langsung pendidikan merupakan hasil yang diperoleh oleh para siswa setelah mereka menyelesaikan proses pendidikannya. Hasil langsung ini berupa; pengetahuan, sikap dan keterampilan.
3. Proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan interaksi antara raw-input-instrumental input dan lingkungan untuk mencapai tujuan pendidikan.
4. Instrumental input. Input atau baru berarti kalau alat tersebut berinteraksi dengan raw input (siswa) dalam proses pendidikan.
5. Raw input dan lingkungan. Kedua komponen ini meskipun mempengaruhi hasil pendidikan, tidak dapat dianggap sebagai ukuran mutu pendidikan.[[23]](#footnote-24)

Berdasarkan uraian tersebut, mutu pendidikan dapat diukur berdasarkan hasil yang dicapainya baik ditinjau dari input pendidikan, sumber daya manusia pelaksana pendidikan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pendidikan serta manfaat yang diperoleh oleh peserta didik maupun msyarakat sebagai akibat dari proses pendidikan itu sendiri.

1. **Upaya-Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan**

Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan melalui upaya membenahi input, proses yang pada akhirnya dapat menghasilkan *out put* (kualitas) sebagaimana yang diharapkan. Input tersebut menyangkut ketersediaan sumber daya baik kualitas maupun kuantitasnya meliputi guru, sarana prasarana dan pembiayaan pendidikan yang memadai. Demikian pula halnya dengan proses pembelajaran yang dapat dilihat dari upaya manajemen sekolah yang ideal baik dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan proses evaluasi, terutama dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sebagaimana kerangka kurikulum yang diberlakukan.[[24]](#footnote-25)

Pada akhirnya kerja-kerja tersebut dapat memberikan kemungkinan tercapainya mutu pendidikan (*out put*) yang maksimal. Indikator pencapaian mutu ini secara umum dapat dilihat dari kualitas peserta didik baik dalam bentuk kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Menurut Wahab Perubahan di sekolah hanya dapat terjadi apabila kepala sekolah dan guru memiliki dan memahami visi, misi, dan tujuan dari sekolah, mampu menciptakan kondisi yang kondusif, kemampuan untuk mengantisispasi dan proaktif terhadap perubahan, memelihara dan menumbuhkan nilai-nilai keyakinan, sikap dan budaya sekolah yang baik.[[25]](#footnote-26)

Mulai dewasa ini dan pada masa mendatang, secara bertahap sekolah diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan peserta didiknya. Mulai tahun 1999, pada beberapa SLTP dan SMU telah dikembangkan pendekatan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah disingkat MPMBS (*school based quality improvement*). Pendekatan ini menawarkan kerjasama yang erat antara madrasah, masyarakat, dan pemerintah dalam upaya mendorong peningkatan mutu pendidikan di tingkat madrasah. madrasah harus mampu menerjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan serta memahami kondisi lingkungannya. Kemudian, melalui proses perencanaan sekolah memformulasikan kedalam kebijakan “mikro” yaitu bentuk program-program prioritas yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh madrasah yang bersangkutan sesuai visi dan misinya masing-masing”.[[26]](#footnote-27)

Kualitas atau mutu peserta didik sangat bergantung pada kompetensi guru selaku subyek pengajaran. Oleh karena guru diharapkan senantiasa memiliki *sense of develop* (rasa membangun) dan *sense of educate* (rasa mendidik) yang tinggi. Kondisi ini dapat dicapai sekiranya guru memiliki kemampuan menerapkan prinsip-prinsip, metode, media dan strategi belajar mengajar yang efektif dan efisien pada proses belajar mengajar yang dilakukannya. Dengan kata lain guru diharapkan memiliki kemampuan mengelola kelas yang baik.

Selain kualitas guru dukungan kebijakan dan suasana madrasah yang kondusif merupakan sebentuk input yang diperlukan demi menunjang proses belajar mengajar. Dukungan ini mencangkup kerjasama antar guru, kewibawaan kepala madrasah serta ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Siregar merunut dan mengumpulkan berbagi referensi literal yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Berbagai ahli mencoba menguraikan perspektifnya terhadap upaya membangun kualitas proses pendidikan. Masalah peningkatan mutu pendidikan sebagai isue sentral pembangunan telah dilakukan dengan berbagi cara dan upaya, namun hasilnya belum optimal.[[27]](#footnote-28) Teknologi pendidikan yang merupakan bagain dari pendidikan, yang berhubungan dengan segala aspek pemecahan masalah belajar manusia melalui proses yang rumit dan saling berkaitan, juga upaya peningkatan mutu pendidikan dengan cara-cara yang khas.

1. **Deskripsi Manajemen Pembiayaan**
2. **Pengertian Manajemen**

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *manage* yang memiliki arti mengatur, mengurus, melaksanakan, mengelola.[[28]](#footnote-29) Dalam dunia pendidikan, manajemen lebih ditekankan kepada upaya untuk mempergunakan sumber daya seefektif dan seefisien mungkin.[[29]](#footnote-30) Manajemen berasal dari kata *to* *manage* artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi manajemen itu.[[30]](#footnote-31) Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Menurut Henry L. Sisk mendefinisikan bahwa: “*Management is the coordination of all resources through the processes of planning, organizing, directing, and controlling in order to attain stated objectives.”*[[31]](#footnote-32) Artinya, manajemen adalah mengkoordinasikan semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisaian, penggerakan, dan kontrol guna mencapai tujuan secara obyektif. Menurut Stewart, Mitchell, dan Aileen manajemen sebagai suatu konseptual yang memiliki kajian yang berfokus kepada masalah kesejahtraan dan pemenuhan kebutuhan bagi ummat manusia dimana senantiasa berusaha mendahulukan penyelesaian suatu pekerjaan yang harus dilakukan, kemudian baru menunggu hasil yang diharapkan, oleh sebab itu dalam manajemen yang terpenting bagaimana suatu pekerjaan dapat dikerjakan atau dengan kata lain diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah dipertimbangkan dan baiaya yang telah diperhitungkan sebelumnya, baru kemudian mengharapkan hasil yang akan diperoleh.[[32]](#footnote-33)

Adapun pengertian manajemen menurut Miller, sebagaimana yang dikutip oleh Sufyarma. M, mengemukakan tentang manajemen sebagai berikut: “*Management is the prosess of directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desired goal*”. Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa manajemen pendidikan sebagai seluruh proses kegiatan bersama dan dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang ada, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan.[[33]](#footnote-34)

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disintesiskan bahwa secara substansial manajemen adalah upaya mengkordinasikan berbagai sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah kegiatan menyelenggarakan organisasi yang mana di dalamnya terdapat pengelolaan unsur-unsur dan sumber daya organisasi dengan menggunakan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen pendidikan adalah aplikasi prinsip, konsep, dan teori manajemen dalam aktifitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pencapaian tujuan secara efektif artinya suatu keadaan yang menunjukkan ketercapaian tujuan atau target dengan kualitas dan kuantitas yang baik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sementara itu, pencapaian tujuan secara efisien artinya keadaan yang menunjukkan ketercapaian tujuan dengan kualitas dan kuantitas yang baik tanpa menghabiskan banyak sumber daya.

1. **Manajemen Pembiayaan Pendidikan**

Manajemen keuangan (pembiayaan) adalah segala akivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktivitas dengan beberapa tujuan tertentu.[[34]](#footnote-35) Suad Husnan juga berpendapat dalam bukunya manajemen keuangan (pembiayaan) menyangkut kegiatan perencanaan, analisi dan pegendalian keuangan.[[35]](#footnote-36) Manjemen keuangan (pembiayaan) pendidikan dalam penelitian ini merupakan suatu tindakan untuk mengatur keuangan (pembiyaan) dengan baik dan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan. Manajemen keuangan pendidikan merupakan proses pengaturan dan pengelolaan biaya secara efektif dan efesien dalam usaha pembiayaan pendidikan yang menyangkut perencanaan, pemenuhan biaya, dan pengevaluasian, agar dalam suatu lembaga tersebut bisa bermutu, baik dari kopetensi guru, sarana dan prasaranya. Menurut Agus Sartono manajemen keuangan adalah manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.[[36]](#footnote-37)

Manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketata usahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Jadi manajemen (pembiayaan) menurut para pakar diatas dapat penulis simpulkan bahwa Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses pengaturan dan pengelolaan biaya secara efektif dan efesien dalam usaha pembiayaan pendidikan yang menyangkut perencanaan, pemenuhan, evaluasi dan pertanggung jawaban baik dari mana perolehan dana tersebut. Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan pendidikan dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah
2. Meningkatkan akuntabilitas transparansi keuangan sekolah
3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.[[37]](#footnote-38)

Agar dapat mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas pimpinan menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar sumber anggaran dapat memenuhi kebutuhan sekolah serta penggunaanya dapat tepat sasaran sehingga bermanfaat bagi sekolah.

1. **Model-model Pembiayaan Pendidikan**

Sistem pendidikan di Indonesia memperlihatkan bahwa biaya sekolah masih dibebankan sebagian besar kepada pemerintah. Berbeda halnya dengan model pembiayaan pendidikan yang dilakukan di negara lain, di negara berkembang pada waktu pembangunan dan menguntungkan bagi sektor pendidikan**.** Menurut Jones, ada enam model pembiayaan pendidikan, yaitu:

1. *Flat Grant*

*Flat grant* merupakan tipe bantuan pembiayaan pendidikan yang pertama dan tertua. Dalam rencana ini, setiap sekolah memiliki sejumlah dana yang sama, yang dihitung per siswa atau per unit pendanaan lainnya. Sebagaimana penjelasan terdahulu, akibat dari sistem bagi rata, maka sekolah yang jumlah siswanya banyak akan mengeruk uang lebih besar, sehingga atas dasar hal tersebut flat grant tidak dianggap sebagai *equalizing*.[[38]](#footnote-39)

1. *Power Equalizing*

*Power equalizing* dibebankan kepada distrik-distrik yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut kembali ke kantong negara bagian. Negara bisa menggunakan uang yang dari distrik-distrik kaya untuk manambah bantuan bagi distrikdistrik yang miskin. Setiap daerah akan menerima jumlah dana berbeda tergantung pada kemampuan penghasilan daerah (APBD). Daerah miskin akan menerima 5 per mil ditambah dengan 7 per mil dana dasar daerah. Dengan demikian akan ada keseimbangan dana antar daerah-daerah yang sumber daya alamnya kaya.

1. *Complete State Model*

*Complete state* model adalah satu-satunya rencana pembiayaan pendidikan yang dirancang untuk menghapus semua perbedaan lokal, baik dalam pembelanjaan maupun dalam pemerolehan pajak tidak akan ada pajak property sekolah lokal dengan berbagai taraf dan basis pajak lokal adalah *unequal* (tidak seimbang). Para pendukung juga mengatakan bahwa pengawasan keuangan lokal tidak efisien untuk masyarakat secara keseluruhan. Maka *complete state* model menempatkan lebih banyak tanggung jawab untuk akuntabilitas pendidikan secara merata di tingkat negara bagian.[[39]](#footnote-40)

1. *Foundation Plan*

*Foundation plan*, dirancang untuk menggali empat masalah besar dalam pendidikan dan keuangan, yaitu: kesetaraan pembelanjaan, penetapan-penetapan standar pajak dan pembelanjaan sekolah minimum, pemisahan (demarkasi) wewenang politik antara distrikdistrik sekolah lokal dengan negara bagian, dan provisi untuk perbaikan berkesinambungan atas proses pendidikan. Para pendukungnya menganggap bahwa negara harus mematok batas-batas minimum dan pemerintah lokal harus diperbolehkan untuk melampaui batas-batas minimum hingga ke tingkatan yang memang ingin mereka lakukan. Cara kerja *foundation plan* adalah, pertama, negara harus menentukan biaya per siswa per tahun bagi program pendidikan yang memuaskan. Kedua, negara harus mematok tarif pajak minimum yang harus diberlakukan oleh semua distrik sekolah. Ketiga, negara memberikan hibah (*grants*) kepada tiap distrik sekolah dengan jumlah yang sama. Sedangkan besarnya bantuan adalah situasional terhadap kekayaan lokal tetapi tidak pada upaya pajak. Foundation plan membagi kue dengan porsi yang sama, namun distrik-distrik miskin lebih diutamakan.

1. *Guaranteed Percent Equalizing*

*Model Guaranteed percent equalizing* model ini dimaksudkan bahwa negara membayar persentase tertentu dari total biaya pendidikan yang diinginkan oleh tiap sekolah lokal. Penyertaan persentase negara diberlakukan tinggi pada distrik-distrik sekolah melarat, dan persentase sekolah rendah pada distrik yang kaya. Para pendukung model ini menyatakan bahwa memaksimalkan pengawasan lokal, kesetaraan wajib pajak, dan efisiensi sekolah lokal. Model ini juga mendukung kesetaraan pembayar pajak. Model ini memastikan atau menjamin tiap distrik sekolah lokal dengan sejumlah dana tertentu persiswa untuk tiap pajak yang dipungut secara lokal.[[40]](#footnote-41)

1. *Complete Local Support Model*

Dalam *complete local support model*, semua sumber dana dari pemerintah negara bagian atau dana dari provinsi diharapkan seluruh biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah lokal atau daerah.Sistem ini akan memberikan dampak pada sistem pendidikan yang ada didaerah, karena bisa saja pendapatan daerahnya yang tinggi memberi jumlah dana yang tinggi pula, yang pada akhirnya berbuah pada kualitas hasil (output) yang berbeda. Model pembiayaan yang dijelaskan di atas memberi gambaran bahwa ada keunggulan dan kelemahan pada masing-masing model.[[41]](#footnote-42) Sistem ini akan memberikan dampak pada sistem pendidikan yang ada didaerah, karena bisa saja pendapatan daerahnya yang tinggi memberi jumlah dana yang tinggi pula, yang pada akhirnya berbuah pada kualitas hasil (output) yang berbeda.

Sistem pembiayaan di Indonesia agaknya sulit merujuk kepada salah satu model. Di Indonesia masing-masing elemen seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua murid, dan masyarakat secara ideal harus memberi biaya untuk pendidikan. Ada baiknya beberapa model di atas akan dapat dimodifikasi menjadi sebuah model yang ideal untuk disesuaikan dengan setting area pendidikan ataupun setting sosial budaya daerah.

1. **Macam-macam Pembiayaan Pendidikan**

Pembiayaan pendidikan dalam teori dan praktek, baik pada tataran makro maupun mikro, dikenal berbagai katagori biaya pendidikan. Dalam arti luas, biaya dalam pendidikan meliputi dua komponen, yaitu:

1. Biaya langsung (*direct cost*)

Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dilakukan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar mengajar mahasiswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun mahasiswa sendiri.

1. Biaya tidak langsung (*indirect cost*)

Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya tranprotasi kesekolah, biaya jajan, biaya kesehatan, dan harga kesempatan (*opportunity* *cost).[[42]](#footnote-43)*

Dilihat dari sifat cara perhitungannya, biaya pendidikan dapat dibedakan

menjadi dua kajian, yaitu:

1. Biaya yang bersifat *budgetair*

Biaya budgetair adalah biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai satuan pendidikan, Biaya budgertair

ekolah meliputi tiga bidang, yaitu:

1. Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ketahun, seperti gaji pengawai (guru dan non guru)
2. Biaya oprasional adalah biaya untuk pemeliharaan gedung, fasilitas, dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai)
3. Biaya investasi adalah biaya untuk pembelian dan pengembangan tanah, pembagunan gedung, perbaikan atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis dipakai.
4. Biaya yang bersifat no budgetair

Biaya non burgetair meliputi biaya-biaya pendidikan yang dibelanjakan oleh siswa atau orang tua/keluarga dan biaya kesempatan yang hilang.[[43]](#footnote-44)

1. **Sumber Pembiayaan Pendidikan**

Anggaran pada dasarnya terdiri dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Besarnya, dalam pembahasan pembiayaan pendidikan, sumber-sumber biaya itu dibedakan dalam tiap golongan, yaitu pemerintah, masyarakat, orang tua dan sumbersumber lain.[[44]](#footnote-45)

1. Pemerintah

Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun kedua-duanya yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Besarnya biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah ditentukan berdasarkan kebijakan keuangan pemerintah di tingkat pusat dan daerah setelah mempertimbangkan skala prioritas.[[45]](#footnote-46) Jadi sumber pembiayaan yang dari pemerintah pusat masih umum bisa berupa uang, sarana dan prasaran, buku dan dll.

1. Orang Tua atau Peserta Didik

Sumber pendanaan pendidikan Islam tidak terlepas dari kontribusi orang tua mahasiswa ini kemungkinan merupakan keharusan karena pemerintah belum mampu mendanai seluruh kebutuhan dasar dana sekolah. Hal ini umumnya terjadi di negara-negara berkembang seperti kita. Namun, di negara maju yang pemerintahannya dapat membangun fasilitas sekolah dan fasilitas pendidikan yang baik, mulai dari menyediakan guru yang baik, menyediakan dana yang cukup untuk berbagai program sekolah. Dalam hal ini di dunia pendidikan kita orang tua mahasiswa masih berkehendak untuk menyumbang dana atau berbagai peralatan yang diperlukan sekolah, mereka menginginkan anak-anak mereka memasuki dunia nyata dengan bekal pendidikan terbaik yang dapat mereka peroleh.

1. Kelompok Masyarakat

Sumber pendanaan tidak terlepas dari sumbangsih masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat, kelompok masyarakat ini juga merupakan sumber yang penting dalam hal pendanaan lembaga pendidikan Islam. Adapun masyarakat menggalang pendanaan untuk lembaga pendidikan dalam hal:

1. Dalam hal pengembangan sekolah
2. Berpartisifasi dalam hal membangun sekolah
3. Mencari donatur dan dermawan baik mengikat maupun tidak mengikat.[[46]](#footnote-47)
4. **Perencanaan Anggaran Pendidikan**

*Planning* berasal dari kata *plan* artinya rencana, rancangan maksud, dan niat. *Planning* (perencanaan) adalah proses kegiatan. Perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang di dalamnya memuat segala suatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan, arahan yang akan ditempuh, prosedur dan metode yang akan diikuti dalam pencapain tujuan.[[47]](#footnote-48) Menurut Afifuddin perencanaan bisa diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telan ditentukan.[[48]](#footnote-49)

Dari berbagai pegertian di atas, dapat dipahami bahwa perencanaan dalam manajemen pembiayaan pendidikan ialah kegiatan yang di rencanakan untuk menunjang tercapainya suatu tujuan pendidikan, perencanaan juga menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan. Untuk menciptakan perencanaan yang efektif dan efesien perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh dimensi dan komponen sekolah, sehingga sasaran peningkatan mutu pendidikan sekolah dapat dicapai dengan baik. Perencanaan peningkatan mutu sekolah meliputi, pengelolaan jurusan, perencanaan keuanganya, perencanaan peningkatan sarana pendukung perpustakaan, laboraturium dan srana prasaranya.

Proses perncanaan anggaran akan menghasilkan keputusan yang mempunyai konsekuensi siginifikkan dalam jangka waktu tahun anggaran. Kesalahan dalam penyusunan perencanan anggaran akan mengakibatkan kesulitan dalam pembiayaan sehingga kengiatan tidak akan berjalan dengan semestinya, oleh karena banyak para ahli perencanaan setuju bahwa evaluasi perencanaan anggaran sangat penting bagi peningkatan mutu pendidikan. Perencanaan keuangan sekolah disesuaikan dengan rencana pengembagan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengembagan jangka pendek berupa pengembangan satu tahun. Pengembagan jangka panjang berupa pengembagan lima tahunan, sepuluh tahunan, bahkan bisa dua puluh lima tahun kedepan. Berdasarkan rencana pengembagan sekolah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka dibuatlah perencanaan keuangan sekolah baik jangka pendek maupun panjang. Kalau dianalissi pembuatan perencanaan keuangan, Garner merumuskan sikuensi perencanaan keuangan yang strategis sebagai berikut:

1. Misi
2. Tujuan jangka panjang
3. Tujuan jangka pendek
4. Program, layanan, aktivitas (program, *services, activities*), tujuan jagka panjang, tujuan jangka pendek berdasarkan kondisi riil unit sekolah.
5. Target: baik *outcomes* maupun *outputs,*
6. Anggaran (*budget)*
7. Perencanaan keuangan yang strategis.[[49]](#footnote-50)

Selanjutnya proses penyiapan perencanaan keuangan yang strategis dapat dilihat dilihat pada gambar dibawah:

Misi, tujuan jangka pendek dan jangka panjang

Perencanaan keuangan yang strategis

Tujuan jangka panjang, pendek dan target berdasakan kondisi riil sekolah

Perencanaan keuangan yang strategis berdasarkan kondisi riil sekolah

**Gambar 2.1. Perencanaan Srategis Keuangan[[50]](#footnote-51)**

Siklus tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan rencana strategis memerlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Misi, tujuan jangka panjang dan jangka pendek perlu dirumuskan oleh pimpinan sekolah.
2. Tujuan jangka panjang, pendek dan target berdasakan kondisi riil unit sekolah dan perlu dipahami oleh seluruh staf sekolah.
3. Berdasarkan kondidi riil unit sekolah, maka dirumuskan perencanaan keuangan yang strategis.
4. Perencanaan keuangan yang trategis sudah rumuskan, menjadi bahan masukan pada pengembagan misi dan tujuan universitras pada priode berikutnya.[[51]](#footnote-52)

Dalam pendidikan islam, perencanaan merupaka langkah pertama yang harus diperhatikan oleh para manajer dan para pengelola pendidikan islam. Allah memberikan arahan kepada arahan kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain sebuah rencana yang akan dilakukan pada kemudian hari, sebagaimana

firman-Nya dalam Al Quran surat Al Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[[52]](#footnote-53)

Dalam ayat tersebut tersirat bahwa setiap orang hendaknya mememperhatikan segala yang telah direncanakan untuk hari esoknya. Seorang manajer hendaknya memerhatiakan perencanaan yang telah dibuat. Dengan demikian, pendidikan Islam membutuhkan manajemen. Inti dari manjemen adalah perencanaan tanpa adanya perencanaan akan berakibat buruk terhadap keberlangsungan pendidikan pendidikan. Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen, merupakan suatu proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Perencanaan sebagai syarat mutlak yang harus ada sebelum kegiatan berlangsung. Tanpa adanya perencanaan yang matang, maka suatu kegiatan yang dilaksanakan akan mengalami hambatan, bahkan terancam gagal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Maka dari itu suatu organisasi ataupun lembaga pendidikan sangatlah membutuhkan adanya perencanaan strategik baik itu jangka panjang dan jangka pendek.

Perencanaan pembiayaan sekolah juga memerlukan dana yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat dialokasikan dalam rancangan anggaran. Upanya mengefektifkan pembuatan perencanaan keuangan sekolah, maka yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah pimpinan sekolah. Posisi pimpinan sekolah sebagai *top manager* harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi perbuatan atministratif. Kemampuan untuk mengaplikasi program pendidikan ke dalam evaluasi biaya merupakan hal penting dalam penyusunan anggaran belanja. Kegiatan membuat anggaran belanja bukan pekerjaan rutin atau makanis, melibatkan pertimbangan tentang maksud dasar dari pendidikan dan program.[[53]](#footnote-54)

Saefullah menyatakan bahwa langkah-langkah dalam perencanaan (pembiayaan) adalah sebagai berikut:66

1. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai.
2. Meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan.
3. Menentukan tahap-tahap atau rangkain tindakan.
4. Merumuskan bagaimana masalah trsebut akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu harus diselesaikan.
5. Menetukan siapa yang akan melakukan dan apa yang mempengaruhi pelaksanaan tindakan tersebut.
6. Menentukan cara mengadakan perubahan dalam penyusunan rencana.[[54]](#footnote-55)

Jika langkah-langkah perencanaan tersebut dilaksanakan dengan baik maka, mendapatkan hasil memuaskan dan sesuai dengan tujuan yang kita ingikan, jadi perlu menerapkan langkah-langkah tersebut. Perencanaan keuangan (pembiayaan) pendidikan disesuaikan dengan rencana pengembangan pendidikan secara keseluruhan, baik pengembagan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengembang jangka pendek berupa pengembagan satu tahunan, pengembagan jangka panjang berupa pengembangan lima tahun, sepuluh tahun, bahkan dua puluh lima tahunan. Berdasarkan pengembangan sekolah, baik jagka pendek maupun jangka panjang, maka dibuatlah perencanaan keuangan (pembiayaan) pendidikan. RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaan dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian RAPBS berisi tentang ragam sumber pendapatan dan jumlah nominalnya baik rutin maupun pembagunan, ragam pembelajaran dan jumlah nominalnya dalam satu tahun anggaran. Dalam perencanaan anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS), ada dua hal pokok yang harus dilakukan pimpinan sekolah, bersama guru dan anggota staf lainnya, yaitu penyusunan rencana pendapatan atau penerimaan dan penyusunan rencana pembelajaran atau pengeluaran anggaran.

Penyusunan rencana pendapatan pada dasarnya merupakan pengidentifikasikasian sumber keuangan dan pembuatan perkiraan dana yang diharapkan dapat diperoleh dari setiap sumber biaya tersebut. Sedangkan penyusunan rencana belanja atau pengeluaran anggaran pada dasarnya merupakan segala aktivitas perencanaan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan semua program yang telah direncanakan.[[55]](#footnote-56)

1. **Strategi Pemenuhan Anggaran Pendidikan**

Strategi secara sederhana dapat didefenisikan sebagai keputusan atau tindakan yang berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Menurut T. Hani Handoko strategi merupakan program umum untuk mencapai suatu tujuan organisasi dalam melaksanakan misi. Kata program dalam pengertian yang disampaikan oleh T. Hani Handoko tersebut menyangkut suatu peran aktif, sadar dan rasional yang dimainkan oleh seorang manajer dalam perumusan strategi organisasi. Selain defenisi di muka strategi juga dapat didefenisikan sebagai pola tanggapan organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu.[[56]](#footnote-57)

Strategi pemenuhan pembiayaan pendidikan dapat diuraikan sebagai kegiatan atau usaha-usaha untuk mendapatkan dan menghasilkan uang yang dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Strategi pemenuhan pembiayaan bisa dilakukan dengan cara menggali dana dari berbagai sumber. Strategi suatu lembaga pendidikan dalam menggali dana pendidikan secara administrative dengan bangaiman seorang pimpinan melakukan upaya penegelolaan sumber daya dan sumber dana yang terdapat dalam lingkungan suatu lembaga pendidikan. Pengelolaan pendidikan harus mampu berusaha sebaik mungkin dalam mencarai pemasukan dana, guna memenuhi kebutuhan dalam pembiayaan pendidikan. Sebagaiman orang-orang terdahulu yang berusaha panyah dalam mencari pembiayaan pendidikan.[[57]](#footnote-58) Dengan demikian berdasarkan pemikiran di atas, kemampuan pengelolaan lembaga utamanya.

Penganggaran adalah suatu proses pengambilan keputusan untuk mengatur pemakaian sumber daya pada masa yang akan datang.[[58]](#footnote-59) Anggaran sering kali dimaknai sebagai suatu rencana, namun dalam bidang manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan sering disebut dengan RAPBS. Ada dua bagian dalam penganggaran, yaitu perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Perkiraan dan penyajian pendapatan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat direalisasikan.[[59]](#footnote-60) Biaya pendidikan pada umumnya diartikan sebagai pengeluaran sejumlah uang untuk membiayai pendidikan. Investasi dalam pendidikan diperlukan untuk merespon kebutuhan ekonomi tenaga kerja menurut jenis pendidikan. Investasi merupakan pengorbanan sejumlah nilai tertentu saat ini untuk memperoleh nilai (pengembalian) mendatang yang tentunya dengan harapan lebih besar dari nilai saat ini.[[60]](#footnote-61) Biaya investasi sekolah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana serta biaya pengembangan sumber daya manusia.Sementara itu, biaya personal meliputi segala macam pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh siswa sekolah, antara lain SPP *(tuition fee)* dan biaya praktikum, agar dapat mengikuti pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Adapun biaya operasional sekolah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 62 meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Biaya investasi meliputi penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Sedangkan biaya operasional mencakup tiga komponen, yaitu: (1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; dan (2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai (boardmarker/kapur, penghapus, tinta, kertas tik dan sebagainya); (3) dan biaya operasional pendidikan tidak langsung yakni biaya pemeliharaan sarana dan prasarana,uang lembur, transportasi, air, jasa, daya listrik, telekomunikasi, asuransi dan sebagainya.[[61]](#footnote-62) Penerimaan biaya pendidikan di sekolah H. M. Levin dalam Armida menyatakan adalah *school revenue refer to the financial receipts of school for supporting their operations. Such revenues can be derived from taxation, tuition charges, and student fees as well as from contributions and income from the provisions of goods and services*[[62]](#footnote-63)*.*

Kaitannya dalam penyusunan anggaran adalah harus menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus. Dengan anggaran berimbang maka kehidupan sekolah akan menjadi efektif dan efisien dalam hal keuangan, sehingga sentralisasi pengelolaan keuangan perlu difokuskan pada bendaharawan sekolah, untuk mempermudah pertanggungjawaban keuangan.

Penulis menyimpulkan bahwa anggaran ialah suatu rencana yang berisi jumlah uang yang dimiliki untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Adapun Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS) pada umumnya melalui pendekatan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pada tingkat kelompok kerja yang dibentuk sekolah yang terdiri para pembantu kepala sekolah memiliki tugas antara lain melakukan dentifikasi kebutuhan biaya selanjutnya diklasifikasikn dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan.
2. Pada tingkat kerjasama dengan sekolah madrasah dengan kelompok kerja yang telah terbentuk perlu diadakan rapat pengurus dan rapat anggota dalam mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBS.
3. Sosialisasi dan legalitas setelah RAPBS dibicarakan dengan komite madrasah selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada tahap sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RAPBS kepada Kadis Departemen Pendidikan Nasional untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.

Pada dasarnya, konsep strategi pengelolaan dana pendidikan ada enam konsep strategi, yaitu:[[63]](#footnote-64)

1. Suatu pola yang *intregriti*, *coherent*, dan menyatu setiap komponen.
2. Menentukan dan mengembangkan tujuan lembaga yang dinyatakan dalam sasaran jangka pendek, jangka menegah, jangka panjang, program dan prioritasisasi dari alokasi sumber-sumber daya pendidikan.
3. Memilih jenis kemampuan, keterampilan, pengetahuan apa saja yang mungkin akan diperlukan oleh masyarakat dimasa yang akan datanag.
4. Merespon dengan cepat semua peluang dan ancaman, kelemahan dan keunggulan yang ada dilembaga pendidikan.
5. Membagun komitmen dari semua pihak, mahasiswa, orang tua, masyarakat, pemerintah, unit-unit departemen (Diknas/Depag) sampai pada intern sekolah (pimpinan) untuk bersama-sama meningkatkan mutu sekolah.
6. Menetukan tingkat kontribusi dari setiap input pendidikan yang bermuatan biaya terhadap mutu pendidikan atau prestasi belajar siswa (efesiensi internal) dan angka permintaan masyarakat terhadap lulusan sekolah (efesiensi eksternal).

Dengan memahami keenam konsep strategi pendidikan diatas, dapatdisimpulkan bahwa strategi RAPBS sangat dipengaruhi oleh misi dan faktorlingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat digolongkan menjadi duayakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internalmancakup tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kelengkapan fasilitas,dan biaya yang tersedia disetiap lembaga. Sedangkan lingkungan eksternalmencakup kondisi sosial ekonomi dan aspirasi masyarakat, keadaan sosialekonomi orang tua, globalisasi informasi. Teknologi dan indrusti yangberkembang sangat cepat sehingga sangat berpengaruh terhadap pendidikan.

Berdasarkan hasil studi pembiayaan yang dilakukan oleh Fattahterungkap.71 Bahwa dalam faktor-faktor internal yang memberikan kontribusisignifikan terhadap mutu adalah: kesejahteraan guru, kemampuan guru, **s**arana kelas, buku-buku pelajaran. Keempat komponen tersebut di dalamRAPBS memerlukan skala prioritas dalam mendapatkan alokasi biaya.[[64]](#footnote-65)Salah satu cara berfikir, yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan(pembiayaan) di lembaga pendidikan adalah kreatif dan dinamis selaras dengankebutuhan dan perkembagan yang terjadi di masyarakat dan lingkunganpendidikan.

1. **Pelaksanaan Rencana Anggaran Belanja Sekolah**

Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah swasta di lingkungan kementerian pendidikan nasional tampaknya memadukan antara peraturan pusat dan sekolah swasta. Dalam hal ini ada beberapa anggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah, yang intinya pihak sekolah tidak dapat mengubah dari petunjuk penggunaan atau pengeluarannya. Dengan demikian, pola pengelolaan anggaran sekolah terbatas pada tinggkatan operasional. Salah satu kebijakan tingkat satuan pendidikan adalah adanya pencarian tambahan dana dari partisipasi masyarakat, selanjutnya cara pengelolaannya dipadukan sesuai dengan tatanan yang lazim sesuai dengan peraturan yang berlaku.[[65]](#footnote-66)

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan yakni penerimaan pengeluaran dan penggunaan.

1. Penerimaan

Penerimaan keuangan sekolah dari sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Prosedur pembukuan penerimaan keuangan sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tampaknya menganut pola panduan antara pengaturan pemerintah pusat dan sekolah. Artinya terdapat beberapa anggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang intinya pihak sekolah tidak boleh menyimpang dari petunjuk penggunaan atau pengeluarannya, dan sekolah hanya sebagai pelaksana pengguna dalam tingkat makro kelembagaan. Namun demikian, sesuai dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan dengan pengembangan konsep manajemen berbasis sekolah, maka sekolah memiliki kewenangan dan keleluasaan yang cukup lebar dalam kaitannya dengan manajemen keuangan untuk mencapai efektifitas pencapaian tujuan sekolah. Pada umumnya disetiap sekolah telah ditetapkan bendahara sesuai dengan peran dan fungsinya.

Uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD), ditunjuk bendahara oleh pihak berwenang dan sebagai atasan langsungnya adalah kepala sekolah. Uang yang dibukukan merupakan aliran masuk dan keluar setelah mendapat perintah dari atasan langsung. Sedangkan uang yang diterima dari masyarakat, ditunjuk bendahara lain dengan sepengetahuan dan kesepakatan pihak komite sekolah ditunjuk dari anggota sesuai dengan persetujuan musyawarah. Berkaitan dengan aliran keuangan yang berasal dari masyarakat, sekolah dalam hal ini pengguna harus mendapat persetujuan komite sekolah.

1. Pengeluaran

Pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran keuangan sekolah untuk pembelian sumber atau input dari proses sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-bahan perlengkapan dan fasilitas. Dalam manajemen keuangan sekolah, pengeluaran keuangan harus dibukukan sesuai dengan pola yang telah ditetapkan oleh peraturan. Beberapa hal yang harus dijadikan patokan bendahara dalam pertanggungjawaban pembukuan, meliputi format buku kas harian, dan format laporan daya serap penggunaan anggaran serta beban pajak. Aliran pengeluaran keuangan harus dicatat sesuai dengan waktu serta peruntukannya. Untuk mengefektifkan pembuatan perencanaan keuangan sekolah, maka yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi pembuatan administratif.

Pengefektifan pembuatan anggaran belanja sekolah, yang sangat bertanggungjawab sebagai pelaksana adalah pimpinan sekolah. Pimpinan sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi perbuatan administratif. Kemampuan untuk menerjemahkan program pendidikan ke dalam ekuivalensi keuangan merupakan hal yang penting dalam penyusunan anggaran belanja. Kegiatan membuat anggaran bulanan bukan merupakan pekerjaan yang rutin atau makanis, akan tetapi melibatkan pertimbagan tentang maksud-maksud dari pendidikan dan program. Berdasarkan presfektif tersebut, pembuatan anggaran belanja dapat mebuka jalan bagi pembagunan dan penjelasan konsep-konsep tentang tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan dan diinginkan, serta merancang cara untuk bagaimana dapat mencapainya serta merealisasikan.

Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah dilaksanakan pada akhir tahun ajaran untuk digunakan tahun berikutnya.[[66]](#footnote-67) Perencanaan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam RAPBS harus sangat diperhatikan oleh setiap satuan pendidikan, karna dengan perencanaan dana yang akurat akan dapat dijadikan sebagai pengendalian manajemen dalam suatu pendidikan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Edward J. Blocher, yaitu:

1. Perencanaan dana yang baik mendorong perencanaan strategis dan mengimplementasikan rencana kegiatan.
2. Perencanaan dana menjadi kerangka kerja untuk menilai kinerja.
3. Perencanaan dana yang akurat akan memotivasi pengelolaan (pimpinan) dan staf.
4. Perencanaan yang baik akan meningkatkan koordinasi di antara berbagai sub-sub.[[67]](#footnote-68)
5. **Evaluasi Anggaran Pendidikan**

Evaluasi berasal dari kata *evaluation* (bahasa Inggris). Kata tersebut diserap ke dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi” berarti penilain merupakan kata benda dari “nilai”. Juga berarti “pengukuran” mengacu pada kegiatan membandingkan suatu hal dengan suatu ukuran tertentu sehingga sifatnya menjadi kuantitatif.[[68]](#footnote-69) Supriadi berpendapat dalam bukunya bahwa evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah dicapai.[[69]](#footnote-70) Darwin mengemukakan bahwah evaluasi pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target yang ditentukan.[[70]](#footnote-71)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, kaitannya dengan evaluasi pembiayaan dapat diartikan suatu kegiatan atau proses penilaian terhadap kinerja instusi atau lembaga yang bergerak dalam pengelolaan biaya yang ada, sebagai bahan pertimbagan untuk memperbaiki, penambahan, atau pengembangkan kearah yang lebih efektif dan efesien. Menurut pendapat Matin evaluasi merupakan penggunaan anggaran pendidikan adalah aktivitas melakukan pengukuran untuk menilai perkembangan atau tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana dan program berdasarkan krietria tertentu. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan monitoring yang hasinya sangat diperlukan oleh pimpinan dalam rangka melakukan perumusan kebijaksanaan, termasuk didalamnya untuk mengantisipasi keadaan masa yang akan datang, menyempurnakan rencana dan program tahunan, dan penyempurnaan pelaksanaan suatu kegiatan. Kriteria yang digunakan dalam melakukan penilaian adalah efesiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan pencapain tujuan.[[71]](#footnote-72)

Evaluasi adalah aktivitas melakukan pengukuran untuk menilai perkembangan keberhasiln pelaksanaan rencana dan program berdasarkan kriteria tertentu.[[72]](#footnote-73) Dengan tujuan untuk menilai tingkat keberhasialn pelaksanaan rencana dan program pendidikan, menetapkan kriteria sebagai dasar pengambilan kebijaksanaan, menyempurnakan rencana dan program tahunan serta melaksanakan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan menilai tingkat efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan pendidikan.

Besarnya peranan manajemen keuangan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran di sebuah lembaga pendidikan dijalankan oleh bagian yang menangani khusus manajemen keuangan, atau setidaknya ada orang yang khusus ditunjuk dalam melaksanakan manajemen keuangan. Sedangkan pertanggungjawaban keuangan sekolah dalam bentuk laporan bulanan dan triwulan kepada: a) Kepala Dinas Pendidikan Nasional. b) Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) c) Kantor Departemen Pendidikan Nasional Setempat. Pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan setiap bulan kepada pihak yang di tetapkan sesuai dengan format dan ketetapan waktu.[[73]](#footnote-74) Dengan demikian penulis simpulkan bahwa pelaksanaan manajemen keuangan di sekolah akan berjalan dengan lancar bila pengelolaan keuangan ditangani oleh seseorang yang mengerti betul cara pengelolaan keuangan sekolah dan mempunyai pengetahuan.

Evaluasi merupakan tahapan-tahapan terakhir setelah tahap perencanaa, pengorganisasia, pengawasan, dan evaluasi. Evaluasi didefenisikan oleh fatah sebagai proses pembuatan pertimbagan menurut suatu perangkat criteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Fattah juga mengemukakan bahwa diantara tujuan evaluasi adalah untuk:

1. Memperoleh dasar bagi pertimbagan akhir suatu preode kerja, apa yang telah dicapai, dan apa yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
2. Menjamin cara kerja yang efektif dan efesien yang membawa oerganisasi kepada pengguna sumber daya pendidik (manusia atau tenaga, sarana dan prasarana, biaya) secara efisien dan ekonomis.
3. Memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan dilihat dari aspek tertentu seperti program tahunan, kemajuan belajar.[[74]](#footnote-75)

Evaluasi merupakan elemen kunci dalam perencanaan, jika sebuah unersitas mau belajar dari pengalaman dan tidak statis, maka proses evaluasi dan ummpan balik harus menjadi elemen yang esensial dalam kulturnya. Proses evaluasi harus fokus dapa pelannggan, dan mengeksplorasi dua isu; *pertama*, tingkatan dimana sekolah mampu memenuhi kebutuhan individual para pelanggannya, baik internal maupun eksternal, dan *kedua,* sejauhmana sekolah mampu mencapai misi dan tujuan strategisnya. Untuk memastikan bahwa sebuah evaluasi mampu mengawasi tujuan individual dan sekolah tersebut, maka evaluasi tersebut harus dilakukan dalam waktu tiga level evaluasi, diantaranya:

1. Sengera, yaitu melibatkan pemeriksaan harian, tipe evaluasi ini biasanya berlangsung secara informal dan dilakukan oleh individu guru atau pada tingkat tim.
2. Jangka pendek, yaitu membutuhkan cara yang lebih terstruktur dan lebih spesifik, yang menjamin bahwa pelajar berada dalam jalur yang seharusnya sedang meraih potensinya. Tujuan evaluasi pada tingkatan ini adalah untuk memastikan perbaikan bagi segala sesuatu yang harus diperbsiki bagi segala sesuatu yang harus diperbaiki. Evaluasi jangka pendek dapat digunakan sebagai sebuah metode control mutu yang menyoroti kesalahan dan masalah.
3. Jangka panjang, yaitu sebuah evaluasi terhadap kemajuan dalam mencapai tujuan strategiis. Evaluasi ini merupakan evaluasi yang dipimpin langsung oleh intitusi secara keseluruhan. Tipe evaluasi dilakukan sebagai sebuah usaha pembukaan dalam memperbarui rencana strategis. Tujuan terpenting dari evaluasi ini adalah pencengahan.[[75]](#footnote-76)

Fungsi pada masing-masing tahap berbeda satu sama lainnya. Evaluasi sering dilihat sebagai sebuah upaya pencegahan.Ia bertujuan untuk menemukan apa yang benar dan apa yang salan. Serta menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pencegahan dari kesalahan agar tidak terulang kembali merupakan fungsi evaluasi yang valid, namun ia memiliki kekurangan yang mendasar. Evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat diidentifikasikan ke dalam tiga hal yaitu: pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertangguang jawaban keuangan sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah.

1. **Kerangka Pikir**

Strategi Peningkatan Mutu Melalui Manajemen Pembiayaan

Teori manajemen pembiayaan untuk peningkatan mutu

Oleh:

Khaeruddin dan Mahfud Junaedi (2007: 67)

Manajemen Pembiayaan:

1. Sumber pembiayaan
2. Perencanaan pembiayaan
3. Pelaksanaan pembiayaan
4. Pengawasan pembiayaan

(Suad Husnan & Enny Pudjiastutik, 2002: 4)

**Gambar 2.2. Kerangka pikir**

1. **Hasil Penelitian yang Relevan**

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Azinatul Ayu, W.L., *Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Barkah Kecamatan Lalembuu Kebupaten Konawe Selatan (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Swasta Al-Barkah Tahun 2016)*. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa strategi peningkatan mutu dalam perspektif manajemen berbasis sekolah di MAS Al-Barkah yaitu: (1) menyusun program kerja dengan melibatkan semua elemen sekolah, (2) peningkatan kualitas guru dengn memberdayakan MGMPAI, workshop, pelatihan GMPAI, (3) Peningkatan kualitas siswa dengan mengadakan ulangan harian, les remidi, (4) Peningkatan sarana prasarana dengan pengadaan bahan ajar, (5) Mengadakan monitoring evaluasi (Monev) melalui kunjungan kelas, (6) Rapat rutin kepala sekolah dengan dewan guru dan staf minimal 3 bulan.[[76]](#footnote-77)
2. Wa Ode Kabotuli, *Manajemen Pengembangan Siswa Berprestasi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Muna Kabupaten Muna*. Hasil penelitianya menyatakan bahwa manajemen pengembangan siswa berprestasi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Muna Kabupaten Muna mencakup mencakup penerimaan siswa baru meliputi analisis kebutuhan dan dan kemampuan daya tampung madrasah, pengelompokan siswa berdasarkan prestasi, bimbingan dan pembinaan, serta monitoring perkembangan prestasi siswa. Strategi pengembangan siswa berprestasi mencakup menggunakan beberapa metode yaitu bimbingan belajar secara intensif, pembelajaran siswa secara individu, metode pembelajaran yang berfariasi, pemberian bimbingan khusus, pengelompokan siswa dalam kelompok berdsarkan bidang yang dibimbing oleh guru yang profesional.[[77]](#footnote-78)
3. Edy Karno, *Pemerintah Responsif Pendidikan: Kajian Atas "Program Cerdas Sultraku" di Sulawesi Tenggara*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara merancang program beasiswa cerdas sultraku sebagai bentuk respon atas amanat undang-undang dan kondisi riil sumber daya manusia Sulawesi Tenggara yang secara kualitas masih rendah. Hasil dari program ini adalah terwujudnya harapan masyarakat Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan layanan pendidikan mulai pada jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Program ini diharapkan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan, terutama sebagai jembatan bagi masyarakat tidak mampu.[[78]](#footnote-79)
4. Alviyani, *Manajemen Keuangan di MI Muhammadiyah Tlogorandu Juwiring Klaten*. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, perencanaan keuangan di MI Muhammadiyah Tlogorandu, diawali dengan rapat penyusunan RKAM secara bersama-sama pada awal tahun pelajaran. Perencanaan keuangan melibatkan kepala sekolah, bendahara sekolah dan staf pendidik untuk menyusun kegiatan apa saja yang akan dilakukan sehingga akan terlihat berapa besaran dana yang akan dibutuhkan. Kedua, pelaksanaan keuangan di MI Muhammadiyah Tlogorandu, dalam satu tahun mendapatkan dana BOS sebesar Rp. 84.000.000,- (Delapan puluh empat juta rupiah) digunakan untuk membayar gaji guru, sarana prasarana dan lain-lain. Dengan mendapatkan dana BOS, pelaksanaan di sekolah/madrasah tidak ada save money, karena menggunakan sistem lunas bayar. Ketiga, evaluasi manajemen keuangan eksternal dari TIM Kementerian Agama Kabupaten Klaten, Sedangkan internal dilakukan setelah pelaporan BOS pada rapat kecil setiap tiga bulan.[[79]](#footnote-80)
5. Samiyah, *Manajemen Pembiayaan Dalam Mutu Pendidikan di Universitas Islam Malang (Unisma)***.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) perencanaan anggaran pendidikan Universitas Islam Malang disusun dan dituangkan dalam bentuk RAPBPT yang diadakan pada tiap akhir tahun dengan menetapkan semua program beserta anggaran masing-masing program. 2) Strategi pemenuhan anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Islam Malang yakni: a. strategi unit kerja mandiri, b. sumbangan dana dari yayasan dan mahsiswa, c. memiliki link dengan luar negeri, dan d. pengajuan proposal kepada pemerintah. 3) Evaluasi Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Islam Malang dilakukan melalui: 1) evaluasi program dilakukan setiap persatu semester atau setahun, 2) evaluasi hasil kinerja pegawai, 3) evaluasi mekanisme organisasi, 4) evaluasi hasil analisa internal dan eksternal.[[80]](#footnote-81)

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya identik dengan judul yang diteliti oleh penulis. Namun demikian tidak berarti penulis melakukan duplikasi terhadap penelitian sebelumnya. Aspek yang memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya sebab penelitian/ latar belakang, kajian teori, lokasi dan waktu penelitian berbeda satu sama lain, serta sumber data penelitian.

1. Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah (Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 53 [↑](#footnote-ref-2)
2. Mulyasa, *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h.158 [↑](#footnote-ref-3)
3. Sudarwan Danim, *Agenda Pembaharuan Sistem Pendididan*, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, h. 53 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Guru dan Guru*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 5 [↑](#footnote-ref-5)
5. Hadis, Abdul & Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), h. 84-85. [↑](#footnote-ref-6)
6. Thomas Partono, *Faktor Determinan Produktivitas Sekolah,* Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Tahun 17, Nomor 1, 2013, h. 3. [↑](#footnote-ref-7)
7. Marus Suti, *Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Daerah*, Jurnal MEDTEK, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2011, h. 5. [↑](#footnote-ref-8)
8. Dedy Achmad, *Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Dasar di Bandung,* Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 12. No I April 2011, h. 5. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ara Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan (Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah* ), (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), h. 320-321. [↑](#footnote-ref-10)
10. Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2011), h. 73 [↑](#footnote-ref-11)
11. Soewarso Hardjosoedarmo, *Total Quality Management*, (Yogyakarta: ANDI, 2004), h. 1 [↑](#footnote-ref-12)
12. Abdul Hadis & Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 92- 93 [↑](#footnote-ref-13)
13. Sudarwan Danim, *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 53 [↑](#footnote-ref-14)
14. Choirul Fuad Yusuf, *Budaya Sekolah dan mutu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Pena Citrasatria, 2008), h. 21 [↑](#footnote-ref-15)
15. Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita, 2001), h. 67 [↑](#footnote-ref-16)
16. Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi…*, h. 33 [↑](#footnote-ref-17)
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Ayat (1), h. 2-3. [↑](#footnote-ref-18)
18. Undang-undang Standar Nasional Pendidikan …., h. 2-3 [↑](#footnote-ref-19)
19. Jerry H Makawimbang, *Supervisi Dan Peningkatan Mutu Pendidikan* (Bandung: CV. Alvabeta. 2011), h. 64 [↑](#footnote-ref-20)
20. E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 2005), h. 24 [↑](#footnote-ref-21)
21. E. Mulyasa, *Kurikulum …*, h. 25 [↑](#footnote-ref-22)
22. Dirto H, *Wawasan Kependidikan Guru* (WKG), (Jakarta: Depdikbud Dirjen PT, P2LPTK, 1980), h. 391 [↑](#footnote-ref-23)
23. Dirto H, *Wawasan…,* h. 392. [↑](#footnote-ref-24)
24. Anonim, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah,* (Jakarta: Dirjen Diknasmen Diknas, 2001), h. 10 [↑](#footnote-ref-25)
25. Abdul Aziz Wahab, *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan,* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 294-295 [↑](#footnote-ref-26)
26. Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicyta Karya Nusa, 2001), h. 23. [↑](#footnote-ref-27)
27. Eveline Siregar, *Mozaik Teknologi Pendidikan: Peningkatan Mutu Pendidikan Resensi Buku* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 26 [↑](#footnote-ref-28)
28. John M. Echols dan Hasan Shadaly, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia,* (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), h. 372 [↑](#footnote-ref-29)
29. Soebagio Admodinata, *Manajemen Pendidikan di Indonesia,* (Jakarta: Ardya Jaya, 2000), h. 228 [↑](#footnote-ref-30)
30. Malayu Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 2. [↑](#footnote-ref-31)
31. Henry L. Sisk, *Principles of Management*, (Brighton: South-Western Publishing Company, 2006), h. 10 [↑](#footnote-ref-32)
32. Stewart, Mitchell, dan Aileen, *Empowering People* (Pemberdayaan Sumber Daya Manusia). Terjemahan: Agus M. Hardjana. (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 76 [↑](#footnote-ref-33)
33. H. Sufyarma. M, *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 189. [↑](#footnote-ref-34)
34. Heru Sutojo, *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Selemba Empat, 1997), h. 2. [↑](#footnote-ref-35)
35. Suad Husnan & Enny Pudjiastutik, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan,* (Yogjakarta: AMP YKPN, 2002), h. 4. [↑](#footnote-ref-36)
36. Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi,* (Jogjakarta: Andi Offset, 2001), h. 6 [↑](#footnote-ref-37)
37. Suryobroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 86. [↑](#footnote-ref-38)
38. T.H. Jones, *Introduction to School Finance: Technique and Social Policy*, (New York: Macmillan Publishing Company Jones, 1985), h. 100-131 [↑](#footnote-ref-39)
39. Ferdi W. P., *Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 4, Desember 2013 [↑](#footnote-ref-40)
40. Armida, *Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Media Akademika, Vol. 26, No. 1, Januari 2011 [↑](#footnote-ref-41)
41. T.H. Jones, *Introduction to School*…., h. 131 [↑](#footnote-ref-42)
42. Dedi Supriyadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menegah,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 4 [↑](#footnote-ref-43)
43. Mulyono, *Manajemen & Organisasi Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 24-25 [↑](#footnote-ref-44)
44. Nanang Fattah*, Landasan Manajemen Pendidikan*, (Rosda Karya, Bandung: 2006), h. 48. [↑](#footnote-ref-45)
45. Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam,* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h.

    268. [↑](#footnote-ref-46)
46. Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta, Ciputat Press: 2005), h.

    269. [↑](#footnote-ref-47)
47. Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 211 [↑](#footnote-ref-48)
48. Afifuddin, *Perencanaan dan Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar,* (Bandung: Insane Mandiri, 2005), h. 7. [↑](#footnote-ref-49)
49. Direktorat Tenaga Kependidikan, *Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Keuangan Sekolah*, (Jakarta: Kemendiknas, 2007), h. 1-3 [↑](#footnote-ref-50)
50. Direktorat Tenaga Kependidikan, *Pendidikan dan Pelatihan*…., h. 2 [↑](#footnote-ref-51)
51. Direktorat Tenaga Kependidikan, *Pendidikan …*, h. 1-3 [↑](#footnote-ref-52)
52. Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2017), h. 548 [↑](#footnote-ref-53)
53. Baihaqi, Nasir Usman & Cut Zahri, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada SMK Negeri di Kabupaten Aceh Besar,* Jurnal Administrasi Pendidikan Volume 1, No 1 Agustus 2012, h. 37 [↑](#footnote-ref-54)
54. Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 218 [↑](#footnote-ref-55)
55. Ibrahim Bafadal*, Dasar-Dasar Manajemen Dan Supervise Taman Kanak-Kanak,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 49. [↑](#footnote-ref-56)
56. T. Hani Handoko, *Manajemen* (Edisi Kedua), (Yogyakarta: BPFE Anggota IKPI, 1995),

    h. 79. [↑](#footnote-ref-57)
57. Mukhtar & Iskandar, *Orientasibaru Supervise Pendidikan*, (Jakarta: Gaung Persada GP Press, 2009), h. 152 [↑](#footnote-ref-58)
58. Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 4. [↑](#footnote-ref-59)
59. E. Mulyasa, *Manajemen* …, h. 47-48. [↑](#footnote-ref-60)
60. Nanang Fattah*, Ekonomi* …, h. 39. [↑](#footnote-ref-61)
61. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 12-13 [↑](#footnote-ref-62)
62. Armida, *Sistem Anggaran Pendidikan (Studi Tentang Sistem Penganggaran Pendidikan dan Efektivitas Penggunaan Biaya Pendidikan serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Jambi)”,* Jurnal Penelitian Pendidikan Volume 12, Nomor 1, 1 April 2011, h. 5. [↑](#footnote-ref-63)
63. Nanang Fatah, *Ekonomi …,* h. 46. [↑](#footnote-ref-64)
64. Nanang Fatah, *Ekonomi …,* h. 86 [↑](#footnote-ref-65)
65. E. Mulyasa, *Manajemen …,* h. 176 [↑](#footnote-ref-66)
66. Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan: Problem Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h, 94 [↑](#footnote-ref-67)
67. Edward J. Blocher & Kung H. Chen, *Manajemen Biaya,* (Jakarta: Salemba Empat, 2007),

    h. 454. [↑](#footnote-ref-68)
68. Suharsimi Arikunto, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2004), h. 1. [↑](#footnote-ref-69)
69. Sukardi, *Evaluasi Pendidikan, Prinsip & Operasionalnya*, (Jogjakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 1 [↑](#footnote-ref-70)
70. Mukhtar, *Orientasi Baru Supervise Pendidikan*, (Jakarta: GP Press, 2009), h. 228 [↑](#footnote-ref-71)
71. Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali, 2014), h. 205. [↑](#footnote-ref-72)
72. Matin, *Manajemen …*, h. 205. [↑](#footnote-ref-73)
73. E. Mulyasa, *Manajemen …,* h*.* 201-206. [↑](#footnote-ref-74)
74. Nanang Fattah, *Landasan* …, h. 107-108 [↑](#footnote-ref-75)
75. Salis Edward, *Total Quality Management In Education Manajemen Mutu Pendidikan*, (Jogjakarta, IRCioD, 2006), h. 236-237 [↑](#footnote-ref-76)
76. Azinatul Ayu, W.L., *Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Barkah Kecamatan Lalembuu Kebupaten Konawe Selatan (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Swasta Al-Barkah Tahun 2016)*, (Tesis) Pascasarjana IAIN Kendari 2017 [↑](#footnote-ref-77)
77. Wa Ode Kabotuli, *Manajemen Pengembangan Siswa Berprestasi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Muna Kabupaten Muna* (Tesis) Pascasarjana IAIN Kendari 2018 [↑](#footnote-ref-78)
78. Edy Karno, *Pemerintah Responsif Pendidikan: Kajian Atas "Program Cerdas Sultraku" di Sulawesi Tenggara,* Jurnal Shautut Tarbiyah, Ed. Ke-35 Th. XXII, November 2016 [↑](#footnote-ref-79)
79. Alviyani, *Manajemen Keuangan di MI Muhammadiyah Tlogorandu Juwiring Klaten* (Naskah Publikasi) Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016. [↑](#footnote-ref-80)
80. Samiyah, *Manajemen Pembiayaan Dalam Mutu Pendidikan di Universitas Islam Malang (Unisma),* (Thesis) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016 [↑](#footnote-ref-81)